

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ditetapkannya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa diupayakan bisa membawa paradigma baru di pembangunan, bisa mengubah cara melihat pembangunan, bahwa kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi tak selamanya berada di perkotaan atau kota, tetapi dalam membangun Indonesia wajib dimulai asal desa. Karena desa menjadi bagian terdepan dari usaha gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna menuju kemakmuran serta kesejahteraan, sekaligus berkesinambungan serta berkeadilan. Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah (Basirrudin, 2012:2) dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulasi atau perangsang (Wardoyo, 2015:5). Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa (Taufik, 2012:8).

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Reaso, 2015:7). Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*goodgovernance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi, diperlukan monitoring, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

Menurut Arens (2012:23), pengendalian internal meliputi lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilai risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Elemen-elemen tersebut membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Mencegah tindakan kecurangan (*fraud*), organisasi harus memiliki pengendalian internal yang kuat. Pengendalian internal diartikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Selain itu, berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*).

Penelitian Nita (2019) menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin efektif pengendalian internal suatu perusahaan, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Lestari (2017) efektifitas pengendalian berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikurangi jika sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif dalam perusahaan. Semakin baik pengendalian internal akan menjadikan menurunnya tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Randiza (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Tidak hanya pengendalian internal yang efektif yang dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan, akan tetapi juga integritas. Integritas dianggap sebagai suatu prinsip untuk mematuhi peraturan yang ada dalam melakukan setiap kegiatan. Integritas merupakan komitmen teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian konsep diri yang di tampilkan melalui perilaku (Dewi dan Ratnadi, 2017). Hanim dkk (2017:2) menyatakan bahwa integritas dapat menghalangi terjadinya kecurangan. Integritas dalam administrasi publik mengacu pada kejujuran karyawan dalam menjalankan tugas mereka, menghindari korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Sehingga setiap pegawai perlu memiliki integritas agar mereka dapat meningkatkan kedisiplinan, mengikuti aturan yang berlaku serta bertanggungjawab atas tindakan mereka.

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditunjukkan melalui perilakunya (Schlenker, 2012:8). Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa integritas memiliki pengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Dewi dan Ratnadi (2017) yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) juga menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang tidak memiliki integritas yang tinggi maka, dia akan mudah melakukan kecurangan akuntansi.

Merujuk *Agency theory* yang menyatakan bahwa dalam organisasi terjalin hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Pengelola (*agent*) merupakan orang yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan tindakan sesuai keinginan prinsipal. Namun, dalam hubungan tersebut kemudian muncul permasalahan yaitu perbedaan keinginan dan tujuan antara prinsipal dan agen. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya asimetri informasi, yang memicu adanya konflik (Rachmawati dan Marsono, 2014). Agen sebagai pihak internal tentu saja memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan prinsipal, sebab segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi merupakan tanggungjawab agen. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh agen untuk menyembunyikan informasi dari prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal tidak dapat mengetahui kinerja agen yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara keduanya (Rachmawati dan Marsono, 2014).

Adanya ketidakseimbangan informasi menyebabkan masing-masing pihak mencoba memanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Karena terjadinya asimetri informasi antara keduanya akan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dapat menimbulkan kecurangan. Kecurangan yang terjadi mulai dari salah saji laporan keuangan, penyimpangan terhadap aset hingga korupsi yang kini marak terjadi di Indonesia (Lestari, 2017:2).

Asimetri informasi jika terjadi akan menyebabkan konflik antara prinsipal dengan agen. Karena asimetri yang terjadi antara *principal* dan *agen* menyebabkan adanya kecurangan laporan keuangan. Penelitian Nita (2019) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian

Randiza (2016) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Selanjutnya penelitian Lestari (2016) juga menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hal tersebut berarti semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen akan menyebabkan semakin meningkatnya perilaku atau tindakan kecurangan akuntansi.

Kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, kecurangan dengan cara menyalahi sistem adalah kecurangan yang lebih sering terjadi. Tindakan tersebut dilakukan agar mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi yang dapat dilakukan oleh orang yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Untuk itu suatu organisasi harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan.

Ditinjau dari teori atribusi, teori ini membahas penyebab-penyebab perilaku seseorang dan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku seseorang. Sebab perilaku kecurangan terjadi salah satunya karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Seseorang melakukan kecurangan karena adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi. Seseorang mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah finansial.

Menurut Kurniawati (2012:9) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit dan sikap apatis. Longgarnya pengendalian internal dan kurangnya pengasawan dalam suatu perusahaan dapat

memicu pegawai untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi merupakan sikap yang membenarkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya.

Kecurangan (*fraud*) dalam bidang akuntansi banyak menyita perhatian publik. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia sudah terlampau sering terjadi. Berita mengenai hal itu telah tersebar di berbagai media massa sehingga kecurangan akuntansi sudah bukan rahasia lagi. Kasus fraud yang sering terjadi dimulaidari kecurangan akuntansi yang mengarah pada tindak korupsi. Tindakan yang sering terjadi dan mengarah pada korupsi yaitu manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara (Dewi dan Ratnadi, 2017). Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering terjadi di lembaga atau instansi pemerintahan. Kasus korupsi tersebut menjadi perhatian penting dan isu utama karena mempengaruhi perekonomian dan stabilitas negara. Kasus korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan yang menimbulkan kerugian negara dan memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi.

Banyak sekali para ahli yang mencoba merumuskan pengertian korupsi, dan jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada intinya memiliki makna yang sama. Dalam pendekatan sosiologis korupsi adalah “penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi”. Menurut Zulkarnain (2013:10), korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan

maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain yang secara salah menggunakan jabatannya atau kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak orang lain.

*Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengemukakan Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2018. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam laporan ICW bahwa kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 terdapat 482 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun, kemudian pada tahun 2018 kasus korupsi yang terjadi menjadi 576 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 6,5 triliun.

ICW menyebutkan bahwa kasus korupsi terbesar yaitu pada pemerintah daerah dengan 222 kasus dan kerugian negara sebesar Rp 1,17 triliun. Kasus korupsi terbesar selanjutnya pada pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 33,6 miliar. Kasus selanjutnya pada pemerintah kota dengan jumlah kasus sebanyak 45 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 159 miliar ([www.icw.or.id](http://www.icw.or.id): 17 Oktober 2019). Selain itu pemantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, menyatakan bahwa kenaikan sangat drastis kasus korupsi di Indonesia adalah pada pemerintah tingkat desa. Pada tahun 2016, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 41 kasus. Pada tahun 2018 kenaikan kasus yang sangat drastis dari 41 kasus menjadi 96 kasus. Dan total kasus sejak 2016-2018 mencapai 154 kasus.

Kasus korupsi di tingkat desa menyebabkan kerugian negara pada tahun 2016 sebesar Rp 9,12 miliar, lalu pada tahun 2017 Rp 8,33 miliar dan meningkat menjadi Rp30,11 miliar pada tahun 2018. Dari 154 kasus sebanyak 82 % dana yang di korupsi merupakan anggaran desa, dan 18% sisanya terjadi korupsi non-anggaran yang berupa pungutan liar (www.icw.or.id: 16 Oktober 2019).

Kecurangan (*fraud*) juga pernah terjadi di Desa X Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2017 lalu, kecurangan tersebut dilakukan oleh Kepala Desa X. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Kejari Rohul, Freddy Daniel Simanjuntak SH, M.Hum, melalui Kasi Pidana Khusus Kejari Rohul, Nico Fernando, SH, dirinya membenarkan Kejari Rohul tengah menangani indikasi penyelewengan bantuan ADD, di salah satu desa di Kecamatan Bonai Darussalam. bahwa memang terjadi korupsi di Kantor Desa X yang mana Kepala Desa (Kades) terjerat kasus kecurangan pengalokasian dana desa tahun 2015 yang nilainya mencapai Rp 500 juta (www.porosriau.com: 16 Oktober 2019). Hal ini menjadi penambah rentetan kasus kecurangan di lembaga pemerintah khususnya pemerintah desa.

Selanjutnya untuk mengetahui permasalahan yang mendasari terjadinya kecurangan akuntansi pada desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam, maka peneliti mencoba melakukan observasi lanjutan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan variabel yang akan diteliti kepada sampel penelitian dalam hal ini adalah perangkat desa. Peneliti memilih sampel sebanyak 21 orang perangkat desa secara acak. Adapun daftar pertanyaan dan hasil jawaban responden disajikan pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Olahan Survei Awal Penelitian**

No	Pertanyaan	Jawaban	
	Pengendalian intrenal	Keterangan	Orang
1.	Apakah pegawai ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya?	Ya Tidak	10 11
2.	Apakah pegawai mengetahui proses penilaian resiko yang dilakukan pimpinan?	Ya Tidak	8 13
3.	Apakah ada pemisahan tugas sesuai tanggung jawab pegawai?	Ya Tidak	20 1
4.	Apakah semua transaksi dikelola dengan komputerisasi dan dicatat di buku besar?	Ya Tidak	9 12
5.	Apakah audit internal melakukan pengawasan yang efektif?	Ya Tidak	10 11
No	Integritas	Keterangan	Orang
1.	Apakah anda selalu bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada?	Ya Tidak	18 3
2.	Apakah anda berani mempertahankan sikap dan pendapat serta tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain	Ya Tidak	16 5
3.	Apakah anda bersikap bijaksana dengan selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama?	Ya Tidak	19 2
4.	Apakah anda memiliki rasa tanggung jawab bila hasil kerja masih memerlukan perbaikan sempurna?	Ya Tidak	19 2
No	Asimetri informasi	Keterangan	Orang
1.	Apakah perangkat desa memiliki informasi lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibandingkan pihak eksternal?	Ya Tidak	19 2
2.	Apakah perangkat desa lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibandingkan pihak eksternal?	Ya Tidak	20 1
3.	Apakah perangkat desa lebih mengenal teknis pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya dibandingkan pihak eksternal?	Ya Tidak	18 3
4.	Apakah perangkat desa selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesi dalam mengerjakan laporan keuangan?	Ya Tidak	12 9

Sumber: Hasil survei Awal Penelitian, 2021

**Tabel 1.2**  
**Data Olahan Survei Awal Penelitian**

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Keterangan	Orang
1.	Apakah anda pernah melakukan pemanipulasian bukti-bukti transaksi dengan mengubah besarnya Nominal?	Ya Tidak	17 4
2.	Apakah pernah anda saling bekerja sama untuk menaikkan anggaran dalam laporan keuangan tanpa disertai bukti transaksi dan dokumen pendukung yang jelas.	Ya Tidak	12 9
3.	Pegawai anda setuju bagian keuangan, sepatutnya berusaha untuk tidak menerima berbagai pembayaran fiktif yang ada di instansi?	Ya Tidak	21 0

Sumber: Hasil survei Awal Penelitian, 2021

Dari hasil survei jawaban responden pada variabel pengendalian internal untuk pertanyaan apakah pegawai ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Dari 21 orang responden sebanyak 10 orang yang menjawab “ya”, selebihnya 11 orang menjawab “tidak”. Artinya dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan pengendalian internal yang terjadi adalah lingkungan pengendalian yang dimiliki desa masih kurang, terlihat dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki perangkat desa kurang mendukung dan sesuai dengan jabatan atau tanggung jawab yang diterimanya. Hal ini diperkuat dengan data tingkat pendidikan yang dimiliki perangkat desa di Kecamatan Bonai Darussalam pada tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3**  
**Pendidikan Aparatur Desa**  
**di Kecamatan Bonai Darussalam**

No	Desa	Tingkat Pendidikan		
		SLTA	D3	Sarjana (S1)
1.	Bonai	5	1	3
2.	Kasang Mungkal	7	-	1
3.	Kasang Padang	6	1	1
4.	Paruh	6	-	2
5.	Rawa Makmur	6	-	2
6.	Sontang	6	1	2
7.	Toluk Sono	6	1	1
Jumlah		41	4	12

Sumber: Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, Tahun 2021

Tabel 1.3 terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki perangkat desa adalah SLTA yang tentunya kurang mendukung pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab perangkat desa, sehingga kurang dapat menciptakan pengendalian internal yang baik di lingkungan pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi pada desa di Kecamatan Bonai Darussalam).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan kondisi permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi berpengaruh secara simultan terhadap kecurangan akuntansi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.
2. Untuk menganalisis pengaruh integritas terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi secara simultan terhadap kecurangan akuntansi.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Akuntansi dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kecurangan akuntansi (*fraud*) dengan permasalahan kecurangan pada lembaga atau instansi pemerintah.

##### 2. Manfaat bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan:

- a. Sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan
- b. Sebagai sarana untuk memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial yang berkaitan dengan kecurangan
- c. Sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data defenisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengendalian Internal**

Pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan (Amanina, 2011:23).

Menurut Mulyadi (2012:180), defenisi pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Romney dan Steibart (2012:23) mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan.

Menurut Boyton dan Johnson (2012:12) pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, dan personil lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Jusuf (2012:137) “Pengendalian Intern adalah suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa definisi menurut para ahli, maka penulis simpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses-yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.

#### **2.1.1.1 Prinsip-prinsip Pengendalian Internal**

Menurut Levany (2011:23) untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

1. Pemisahan fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.

2. Prosedur pemberian wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.

3. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

5. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan aset dengan aset yang betul-betul ada.

### **2.1.1.2 Indikator Pengendalian Internal**

Menurut Boyton dan Johnson (2013:13) mengidentifikasi lima indikator yang saling terkait dalam pengendalian internal:

1. *Control environmen*

Adalah menetapkan tujuan dari sebuah organisasi, yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen lain dari pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. *Risk assessment* (penaksiran resiko)

Adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuannya entitas, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. *Control activities* (aktivitas pengendalian)

Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa manajemen yang diarahkan telah dilakukan.

4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)

Adalah identifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. *Monitoring* (pemantauan)

Adalah proses yang menilai kualitas internal kinerja kontrol

Pendapat ini sejalan dengan Zamzami (2016:23) yang mengemukakan ada lima indikator pengendalian internal yang saling terkait berikut ini:

1. Lingkungan pengendalian

Merupakan kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, organisasi harus membangun lingkungan kondusif yang mendorong terimplementasinya pengendalian secara efektif.

2. Penilaian resiko

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

#### 5. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya diselesaikan dengan tepat

### **2.1.2 Integritas**

Secara bahasa integritas atau *integrity* berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa latin yaitu *integer* (keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai sejahtera secara menyeluruh.

Menurut Sukriah (2012:23), integritas adalah menerima norma norma sosial, moral, dan organisasional; memegang teguh prinsip-prinsip moral. Sementara menurut Olson (2013:24), integritas adalah konsistensi antara tindakan yang diyakini seseorang. Mengungkapkan maksud, gagasan dan perasaannya secara terbuka dan langsung juga menghargai keterbukaan dan kejujuran orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.

Covey (2011:17) mendefinisikan integritas sebagai hidup yang dilandasi pada prinsip. Integritas menurut Schlenker (2012:8) adalah bentuk komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologis yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya. Menurut Dewi dan Ratnadi (2017:2), bahwa integritas adalah suatu kondisi dimana seseorang terikat kepada sesuatu hal yang orang lain anggap itu etis dan berharga.

Dengan bersandar pada beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi integritas adalah kejujuran, ketulusan dan kesediaan memegang teguh standar moral yang tinggi. Integritas ditunjukkan oleh kesesuaian antara nilai-nilai yang dipegang dan kebiasaan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan kesesuaian antara ungkapan dan perasaan. Integritas sangat diperlukan untuk menjamin agar kebebasan yang diberikan dapat dipakai secara bertanggung jawab.

#### **2.1.2.1 Karakteristik Integritas**

Orang memiliki integritas hidup sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan merupakan hal yang esensial. Karakteristik integritas menurut Sukriah (2012:23) adalah sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting

Agar memiliki keunggulan integritas, seseorang tidak boleh berbohong dalam hal-hal kecil, tidak akan tergoda oleh hal-hal yang lebih besar- kekuasaan, prestise atau uang. Hal yang juga penting, sebagai orang yang berintegritas

harus setia pada nilai moral internal bahkan bila itu berarti harus berhadapan dengan resiko kehilangan tempat yang nyaman di dunia.

2. Mampu menemukan yang benar.

Untuk mendapatkan keunggulan integritas kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita bisa mengajukan pertanyaan, menerima saran, berefleksi dan melihat jauh ke depan.

3. Bertanggung jawab.

Bersikap terbuka dan jujur, mengungkapkan cerita yang baik maupun yang buruk secara lengkap, berbagi semua informasi penting, tidak hanya informasi yang menguntungkan.

4. Menciptakan budaya kepercayaan.

Menciptakan lingkungan kerja yang benar, yakni lingkungan yang tidak menguji integritas pribadi karyawan atau rekan kerja, memperkuat integritas melalui prinsip, kontrol dan teladan pribadi.

5. Menepati janji.

Memperoleh keunggulan integritas, perlu berlaku penuh integritas, guna memperoleh kepercayaan.

6. Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar

Berkomitmen kuat untuk memberikan keuntungan terhadap organisasi tempat bekerja, memperoleh perasaan tentang adanya tujuan yang lebih dalam.

7. Jujur namun rendah hati.

Lbih banyak membuat tindakan daripada berbicara lebih keras dengan kata-kata.

8 . Bertindak walaupun tanpa pengaawasan

Berfikir bahwa setiap tindakan selalu diawasi.

9. Konsisten.

Memiliki konsistensi dan keterdugaan etis, mencerminkan keutuhan dan keselarasan antara nilai dan tindakan.

### **2.1.2.2 Indikator Integritas**

Perilaku pokok integritas menurut Sukriah (2012:23) adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran

Yaitu menyajikan informasi dan data secara tepat dan lengkap.

2. Keberanian

Yaitu Bertindak berdasarkan nilai-nilai sekalipun hal tersebut mengandung biaya dan resiko yang cukup besar

3. Sikap bijaksana

Yaitu bertindak sesuai dengan nilai-nilai saat hal tersebut sulit dilakukan

4. Tanggung jawab

Yaitu bertindak sesuai dengan yang dijanjikan; tidak membocorkan

Selanjutnya, Covey (2011:17) membagi indikator integritas menjadi beberapa macam:

1. Terbuka dan jujur

Yaitu berinteraksi dengan orang lain secara jujur mengenai situasi pekerjaan.

2. Bertindak secara konsisten

Yaitu bertindak konsisten dalam segala situasi dengan nilai-nilai dan keyakinan.

### 3. Bertanggung jawab

Yaitu bertindak sesuai dengan yang dijanjikan; tidak membocorkan rahasia.

#### **2.1.3 Asimetri Informasi**

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Pengertian asimetri informasi menurut Scoot (2012:105) menjelaskan bahwa, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut Jogiyanto (2013:387) pengertian asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki. Pengertian asimetri informasi menurut Suwarjono (2014:584): adalah kondisi dimana pihak dalam atau pengelola perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola. Menurut Hanafi (2014:217), mengatakan bahwa : “konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.

Asimetri informasi menurut Amalia (2015:2) adalah situasi di mana terjadi kesenjangan informasi antara pihak yang memiliki atau pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi menurut Triyuwono (2018) merupakan bentuk *agency problem* yang terjadi dalam hubungan agensi. Akibatnya, agen yang memiliki informasi lebih daripada prinsipal akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan prinsipal.

Dari teori yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan sebuah konsep yang paling penting dalam teori akuntansi keuangan. Apabila terjadi asimetri informasi maka kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar dan manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lainnya. Akibat dari manipulasi tersebut akan menyebabkan tidak akuratnya laporan keuangan dalam hal ini adalah dalam pembuatan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

### 2.1.3.1 Jenis-jenis Asimetri Informasi

Scott (2012:13) membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul daripada pihak lainnya. Menurut Scott (2012:13-15), dua jenis asimetri informasi yaitu:

#### 1. *Adverse Selection*

Adalah jenis informasi yang diperoleh dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi melalui pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

#### 2. *Moral Hazard*

Adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis atau transaksi potensial, dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

### 2.1.3.2 Indikator Asimetri Informasi

Indikator asimetri informasi menurut Suwarjono (2014:584), yaitu:

1. Informasi yang dimiliki pihak intern instansi dibandingkan pihak luar  
Situasi di mana pihak intern instansi memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
2. Hubungan *input-output* dalam bagian intern instansi  
Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal hubungan *input-output* dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
3. Potensi kinerja  
Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
4. Teknis pekerjaan  
Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
5. Mampu menilai dampak potensial  
Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi
6. Adanya pertimbangan moral dan profesi  
Menggunakan pertimbangan moral dan profesi dalam mengerjakan laporan keuangan

#### **2.1.4 Kecurangan Akuntansi**

Kecurangan (*fraud*) menurut Zulkarnain (2013:5) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Kerugian dari kecurangan akuntansi di pasar modal adalah menurunnya akuntabilitas manajemen sehingga membuat para pemegang saham meningkatkan biaya monitoring terhadap manajemen (Zulkarnain, 2013:5).

Menurut Wilopo (2012:29), umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan akuntansi. Kusumastuti (2012:23) menjelaskan kecurangan adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan.

Kurniawati (2012:12) menjelaskan kecurangan adalah penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Menurut Tuannakotta (2012:12), kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Halim (2013:16) menyebutkan kecurangan adalah segala sesuatu yang secara luhai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur lainnya. Salah satu bentuk kecurangan adalah kecurangan akuntansi. Menurut SPAP 2011, SA seksi 316, kecurangan akuntansi,yaitu salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia .

Menurut Fahmi (2011:24), kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi adalah alat seseorang individual untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian pelaporan keuangan yang palsu sehingga merugikan keuangan perusahaan atau keuangan Negara.

#### **2.1.4.1 Faktor Penyebab terjadinya Kecurangan Akuntansi**

Arens (2012:29) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya kecurangan biasa disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triagle*), yaitu:

1. Insentif/tekanan

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Karyawan mungkin merasa mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan atau masalah *financial*.

## 2. Kesempatan

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Longgarnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan dalam suatu perusahaan dapat memicu karyawan untuk melakukan kecurangan. Dari kondisi tersebut, karyawan merasa mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan.

## 3. Sikap atau rasionalitas

Adanya sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur sebagai tindakan yang jujur.

### **2.1.4.2. Jenis- Jenis Kecurangan Akuntansi**

Arens (2012:43-44) menyebutkan terdapat dua jenis kecurangan akuntansi yang utama, yaitu:

#### 1. Pelaporan keuangan yang curang

Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud mampu menipu para pemakai laporan keuangan tersebut.

#### 2. Penyalahgunaan aktiva

Penyalahgunaan aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Penyalahgunaan aktiva biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus, manajemen

puncak terlibat dalam pencurian aktiva perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajemen memiliki kewenangan dan kendali yang lebih besar atas aktiva organisasi.

#### **2.1.4.3 Indikator Kecurangan Akuntansi**

*The ACFE* dalam Amrizal (2014:10) membagi inidkator kecurangan (*fraud*) dalam tiga tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari :
  - a. *Timing difference (improper treatment of sales)*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
  - b. *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
  - c. *Cancealed liabilities and expenses*, menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
  - d. *Improper disclosures*, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
  - e. *Improper asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.
2. Penyalahgunaan aset, terdiri dari:
  - a. Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.

- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), berupa pencurian dan pemakaian persediaan/aset lainnya untuk kepentingan pribadi.
3. Korupsi (*Corruption*). Yaitu menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi.

Arens (2012:430-432) menyebutkan terdapat dua jenis kecurangan akuntansi yang utama, yaitu:

1. Kecurangan pelaporan keuangan

Yaitu kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan

2. Penyalahgunaan aset

Yaitu kecenderungan dalam melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

3. Korupsi

Yaitu suatu tindakan yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan dengan memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Misalnya dalam melakukan pelanggaran dengan menggunakan kwitansi kosong

4. Ketiadaan bukti transaksi

Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan.

5. Penyalahgunaan anggaran

Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

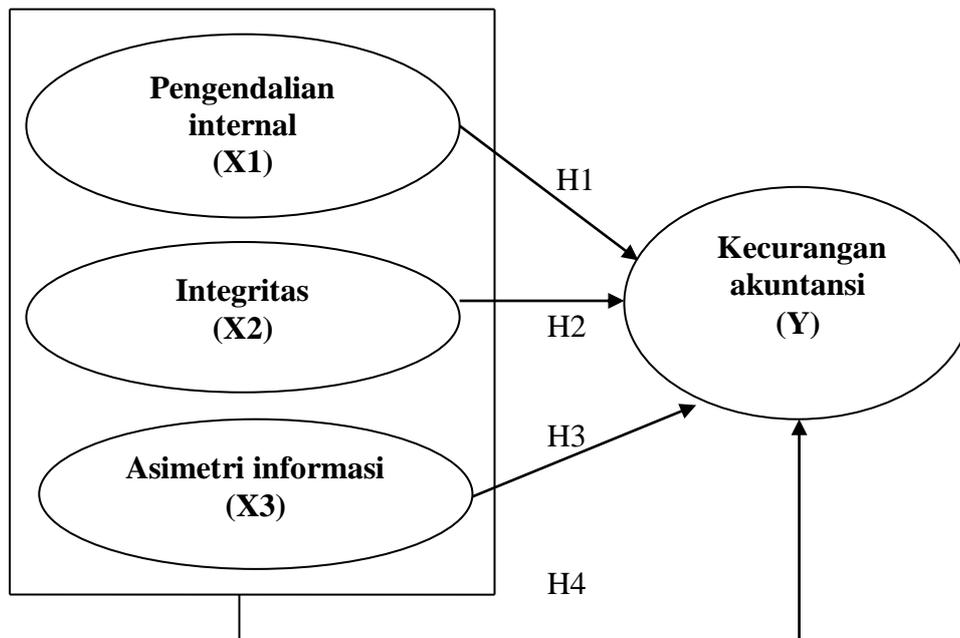
Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Tahun	Judul	Hasil
1	Ni Komang Norma Nita (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, Asimetri Informasi dan Kapabilitas pada kecurangan akuntansi	pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi. Sedangkan variabel asimetri informasi dan kapabilitas berpengaruh positif pada kecurangan akuntansi.
2	Ichsan Randiza (2016)	Pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat pemerintah dan ketaatan aturan terhadap kecurangan akuntansi (studi kasus pada skpd kab. Indragiri hilir)	pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat dan ketaatan aturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Di SKPD Tembilahan.
3	Ni Komang Linda Lestari (2017)	Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi	Pengendalian Internal dan Integritas berpengaruh negatif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung, sedangkan Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap Kecurangan Akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung.

## 2.2 Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas penelitian ini penulis menyajikan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis yang dapat diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Diduga pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
- H2 : Diduga integritas memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
- H3 : Diduga asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
- H4 : Diduga pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap kecurangan akuntansi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Ferdinal, (2013:20) yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu pengendalin intrenal (X1), integritas (X2) dan asimetri informasi (X3) dan variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi (Y). Tempat penelitian dilakukan yaitu di seluruh desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam sebanyak 7 desa. Waktu penelitian mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021.

#### **3.2 Populasi Dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah semua subyek atau obyek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (Ferdinal, 2013:20). Adapun populasi dalam penelitian adalah semua perangkat desa yang ada di Kecamatan Bonai Darussalam sebanyak 57 orang.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Ferdinal, 2013:20). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus). Menurut Ferdinal (2013:23) bahwa sampling jenuh

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 orang.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

1. Data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk fakta yang mendukung penelitian ini.
2. Data Kuantitatif yaitu data ordinal dihitung berdasarkan hasil kuesioner yang disampaikan kepada responden. Data ordinal artinya data yang berupa angka dan memiliki tingkatan yang digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi.

#### **3.3.2 Sumber Data**

1. Data Primer yaitu data lapangan diperoleh langsung dari survei lapangan baik melalui responden berupa wawancara ataupun hasil pengamatan peneliti.
2. Data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan literatur atau buku bacaan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

2. *Questioner* yaitu alat penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan (*Questioner*) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu mengenai masalah yang akan di teliti untuk memperoleh data primer dari sejumlah responden (Ferdinal, 2013:24).

### 3.5 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya (Ferdinal, 2013:26). Berdasarkan landasan teoritis yang telah ada, adapun operasional variabel dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Defenisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Skala
1	Kecurangan akuntansi (Y) Kurniawati (2012) menjelaskan kecurangan adalah penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.	<i>The ACFE</i> dalam Amrizal (2014:10) 1. Kecurangan pelaporan keuangan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi	<i>Ordinal</i>
2	Pengendalian internal (X1) Menurut Mulyadi (2012:180), defenisi pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang	Zamzami (2016:23) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern	<i>Ordinal</i>

	keadaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.		
3.	Integritas (X2) Sukriah (2012:23), integritas adalah menerima norma norma sosial, moral, dan organisasional; memegang teguh prinsip-prinsip moral.	Menurut Sukriah (2012:23) 1. Kejujuran 2. Keberanian 3. Sikap bijaksana 4. Tanggung jawab	Ordinal
4.	Asimetri informasi (X3) Jogiyanto (2013:387) pengertian asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.	Suwarjono (2014:584) 1. Situasi di mana pihak intern instansi memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi. 2. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal hubungan input- output dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi. 3. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi. 4. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi. 5. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi 6 Menggunakan pertimbangan moral dan profesi dalam mengerjakan laporan keuangan.	Ordinal

### 3.6 Instrumen Penelitian

Data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan teknik skala likert. Skala likert biasa digunakan dalam mengukur permasalahan sosial yang terjadi baik berupa sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok (Ferdinal, 2013:23). Untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan di beri skor atau nilai sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Skor Klasifikasi Jawaban**

No	Klasifikasi Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Kurang Setuju (KS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Ferdinal, 2013:23).

Untuk menguji keabsahan dan kesahihan dari suatu kuesioner diperlukan uji realibilitas dan validitas.

3.6.1 Uji Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan suatu instrumen (Ghozali, 2012:56). Kuesioner dikatakan valid apabila  $r$  hitung (*Corrected Item Total Correlation*)  $>$   $r$  tabel dan kuesioner dikatakan tidak valid apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  table. Dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05, maka apabila nilai  $r$  lebih besar dari nilai kritis ( $r_{\text{tabel}}$ ) berarti item tersebut dikatakan valid. Dalam penelitian ini nilai  $r$  dihitung dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18.

3.6.2 Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk (Ghozali, 2012:56). Untuk menguji reliabilitas dapat digunakan rumus alpha *Cronbach's* diukur

berdasarkan skala *Alpha Cronbach's* 0 sampai dengan 1. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Alpha Cronbach's* > dari 0.60

### **3.7 Teknik Analisa Data**

#### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Menurut Ghazali (2012:29), mengartikan analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis ini berguna untuk mengetahui pencapaian jumlah responden yang telah kita bagikan kuesioner. masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban maksimum

Guna menafsir skor yang diperoleh melalui perhitungan atas kuesioner tersebut, maka untuk mendapatkan persentasenya disesuaikan dengan kriteria yang dikemukakan Ghazali (2012:29) sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Analisis Deskriptif Data**

<b>No.</b>	<b>Angka</b>	<b>Keterangan</b>
1	00% - 20%	Tidak baik
2	21% - 45,99%	Kurang baik
3	46% - 69,99%	Cukup baik
4	70% - 79,99%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

Ghozali (2012:29)

### **3.7.2 Analisis Kuantitatif**

#### **3.7.2.1 Uji Prasyarat**

##### **3.7.2.1.1 Uji Normalitas**

Ghozali (2012:32) uji normatis bertujuan untuk menguji apakah distribusi data variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi yang terjadi secara normal. Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal ( $45^\circ$ ), dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2012:32).

##### **3.7.2.1.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara beberapa variabel atau semua variabel bebas. Untuk dapat melakukan uji multikolonieritas dalam model regresi penelitian yang dilakukan akan dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflantion factor* (VIF). Nilai yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* diatas 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2012:32).

### 3.7.2.1.3 Uji Heteroskedasitas.

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedasitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, antara lain melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2012:32).

### 3.7.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari regresi ini berupa koefisien yang dipilih dengan cara melakukan prediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan seperti di bawah ini:

$$Y = a + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

Di mana:

Y	=	Kecurangan akuntansi
$\beta_1, \beta_2$	=	Koefisien Regresi
a	=	Konstanta
X1	=	Pengendalian internal
X2	=	Integritas
X3	=	Asimetri informasi
e	=	Kesalahan estimasi standar

### 3.7.2.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model (X) dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y) yaitu kecurangan akuntansi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat kecil. Nilai  $R^2$  ini berada diantara  $0 \leq R^2 \leq 1$ .

### 3.7.2.4 Pengujian Hipotesis

#### a. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

$H_0$  diterima jika :  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau signifikan  $> 0,05$

$H_0$  ditolak jika :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikan  $< 0,05$

Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

$H_1$  : diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig  $\leq$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.

H<sub>2</sub> : diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig \leq$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan integritas terhadap kecurangan akuntansi.

H<sub>3</sub> : diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig \leq$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.

b. Uji F

Menurut Ghozali (2012:23) uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu :

H<sub>0</sub> diterima jika :  $F_{hitung} <$  dari  $F_{tabel}$  atau signifikan 0,05

H<sub>a</sub> diterima jika :  $F_{hitung} >$   $F_{tabel}$  atau signifikan 0,05

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H<sub>4</sub> : diterima bila  $F_{hitung} >$   $F_{tabel}$  atau nilai  $sig \leq$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.